

# **POLITIK PEMAKNAAN ATAS PANCASILA PADA ERA PASCAREFORMASI**

Oleh: Hastangka  
Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (STIPRAM) Yogyakarta  
hastangka@gmail.com

## **ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang politik pemaknaan atas Pancasila yang berkembang pada periode Pascareformasi. Politik pemaknaan menjadi fokus perhatian dalam kajian ini karena dalam politik pemaknaan yang muncul dan berkembang membahas pada dua aspek mendasar yaitu legitimasi kekuasaan dan legitimasi nilai atas bahasa politik yang digunakan oleh para aktor politik dan masyarakat. Politik pemaknaan dibentuk dari suatu konsep dan realitas sosial dan politik yang berkembang sesuai dengan konteks masyarakat. Dinamika kehidupan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia Pascareformasi ini menarik untuk diamati dan dikaji dalam aspek fenomenologi. Khususnya, pemaknaan terhadap ideologi Pancasila. Pancasila menjadi objek kajian dalam penelitian ini karena dari berbagai literatur yang ada ditemukan berbagai pemahaman dan penafsiran tentang Pancasila yang dilakukan oleh kalangan akademisi. Pancasila dalam aspek ruang lingkup bahasa dikategorikan sebagai ragam bahasa politik. Metode analisis yang digunakan melalui metode analisis fenomenologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik pemaknaan tentang Pancasila pada era Pascareformasi lebih didominasi oleh para aktor politik yang melegitimasi makna Pancasila dalam berbagai bentuk makna. Proses politisasi Pancasila masuk dalam ruang politik, sosial, agama, dan budaya.

**Kata Kunci:** Pancasila, Pascareformasi, Politik, Makna.

## **ABSTRACT**

*This paper discusses about the political meaning over Pancasila which developed in the era of post-reformation. Political meaning addresses two fundamental aspects, namely the legitimacy of power and the legitimacy of values for the political language used by politicians and society. Political meaning is formed by social and reality of politic that develops according to the context of society. The dynamics of social and political life that took place in post-reformation in Indonesia, are interesting to observe and study in the aspects of phenomenology, in particularly, the meaning of the Pancasila ideology. Pancasila, as the object of in this study, has the various existing literature and give the various understandings and interpretations of Pancasila carried out by academics. Pancasila in the aspect of the scope of language is categorized as a variety of political languages. The paper analyzed by phenomenological analysis method. The results of this study indicate that the Political*

*meaning about Pancasila in the post-reform era was dominated by politicians who legitimized the meaning of Pancasila in various forms of meaning. The politicization process of Pancasila is included in the political, social, religious and cultural spheres.*

**Keywords:** *Pancasila, Post-reform, Politics, Meaning.*

## PENDAHULUAN

Era Pascareformasi menjadi titik tolak penting dalam perubahan sosial dan politik di Indonesia. Kondisi sosial dan politik Indonesia Pascareformasi banyak menjadi kajian dan tinjauan dari berbagai kalangan akademisi, peneliti, analis, dan pendidik. Pendekatan yang banyak dibahas dan dibicarakan terkait dengan ideologi, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan sosial. Pada aspek ideologi, wacana tentang ideologi banyak dibicarakan Pascareformasi tentang posisi Pancasila dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila Pascareformasi mengalami dinamika pasang surut, ibarat kata pepatah "*hidup enggan mati pun tak mau*". Kondisi Pancasila era Pascareformasi menunjukkan proses tarik ulur kepentingan dari kalangan politik dan akademisi. Pandangan yang muncul tentang keberadaan Pancasila era Pascareformasi. Pada sisi akademisi, masih menimbulkan pro dan kontra

terutama posisi Pancasila dalam kurikulum pendidikan nasional. Pandangan para akademisi terbelah menjadi dua kubu. Kubu pertama, menolak Pancasila dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional karena Pancasila dianggap sebagai sarana politik penguasa untuk melakukan hegemoni kepada masyarakat dalam menanamkan ideologi politik negara. Kelompok yang menolak kehadiran Pancasila dalam dunia pendidikan masih melihat Pancasila sebagai produk rezim orde baru. Pancasila dianggap tidak relevan untuk dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dalam konteks Pascareformasi karena dianggap tidak sejalan dengan nalar demokrasi. Polemik keberadaan Pancasila Pascareformasi dalam dunia pendidikan membawa dampak pendidikan Pancasila tidak diajarkan lagi di dunia pendidikan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa:

“ayat (1): Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a. Pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; c. bahasa; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; g. seni dan budaya; h. pendidikan jasmani dan olahraga; i. keterampilan/kejuruan; dan j. muatan lokal. Ayat (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; dan c. bahasa.”

Proses peniadaan Pancasila dalam kurikulum pendidikan nasional muncul dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang tidak memasukkan istilah atau nomenklatur pendidikan Pancasila secara eksplisit dalam pasal tersebut. Proses ini menimbulkan penafsiran dan pemaknaan tentang keberadaan Pancasila dalam dunia pendidikan. Apakah pendidikan Pancasila masih relevan dalam konteks reformasi?, bagaimana peran Pancasila dalam konteks reformasi?, dan sampai sejauh mana manfaat Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia modern?, problem-problem aktual dan kritis tentang Pancasila selalu disampaikan oleh kalangan akademisi yang menolak keberadaan Pancasila di dunia pendidikan. Kelompok yang pro

terhadap kehadiran Pancasila dalam dunia pendidikan lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai-nilai dalam meneguhkan dan menegakkan jati diri bangsa dan paham kebangsaan Indonesia. Pancasila dianggap masih tetap relevan untuk dimasukkan dalam dunia pendidikan karena memiliki peran yang strategis dalam membangun karakter bangsa bagi generasi muda. Perjalanan reformasi berjalan tidak sesuai dengan harapan untuk menghadirkan negara yang kuat, berjati diri, dan berwibawa.

Pemaknaan atas Pancasila pada era Pascareformasi menarik untuk diteliti kembali karena proses pemaknaan tentang Pancasila mengalami berbagai dinamika. Kajian ini menjadi penting untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: 1) bagaimana model pemaknaan yang muncul terkait dengan Pancasila?, 2) seperti apa politik pemaknaan yang muncul dalam memaknai Pancasila Pascareformasi ini?

Perjalanan bangsa Indonesia Pascareformasi mengalami berbagai dinamika. Perubahan - perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terutama di bidang politik,

hukum, dan ekonomi sangat dirasakan dampaknya. Pada bidang politik, cara pandang dan pemahaman para elit dalam menalar negara mengalami perubahan dan pergeseran yang mendasar yang perlu mendapatkan perhatian untuk dianalisis dan dilihat dari aspek model pemaknaan dalam memahami ideologi bangsanya. Pemahaman yang berbeda-beda terhadap ideologi suatu bangsa berpengaruh pada perilaku dan sikap para elit dan masyarakat dalam menjawab persoalan kebangsaan. Belajar dari sejarah bangsa, pada periode 1945 sampai dengan 2017, Bangsa Indonesia pernah mengalami tantangan ideologis terkait dasar negara Pancasila mulai dari pemberontakan PKI di Madiun (1948), pemberontakan D.I/ T.I.I, pemberontakan G.30.S tahun 1965, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan lain-lain. Peristiwa tersebut banyak mengambil korban. Suyitno dan Gultom menjelaskan bahwa setiap penyelewengan dan usaha merubah dasar negara selalu minta korban yang tidak sedikit dan biaya yang besar, sehingga kita tidak lagi bisa tenang membangun negara yang kemerdekaannya kita prokla-

masikan pada 17 Agustus 1945 (Suyitno dan Gultom, 1981:88-89). Pada bidang hukum, seperti apa hukum dirumuskan pada era pascareformasi dan bagaimana hukum yang dibuat pada era pascareformasi dapat berpengaruh pada perilaku dan keyakinan masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan peraturan yang dibuat. Pada konteks hukum, ditemukan banyak produk-produk hukum pascareformasi justru tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, cenderung tidak adil, dan mengalami berbagai persoalan. Catatan Mahkamah Konstitusi terkait dengan produk hukum berupa peraturan perundang-undang sepanjang periode 2003 sampai dengan 2018 telah menguji 599 Undang-Undang. Sebanyak 256 dikabulkan karena bertentangan dengan konstitusi atau UUD 1945 dengan berbagai macam bentuk dan kasusnya (<https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=5>, akses 7 Oktober 2018). Pada aspek ekonomi, kehidupan perekonomian di Indonesia mengalami fase percepatan dan perubahan mulai dari kebijakan liberal yang diletakkan sebagai prinsip dasar ekonomi di Indonesia dan lemahnya spirit dan landasan

ekonomi nasional. Oleh karena itu, penjabaran tentang Pancasila yang benar perlu dilakukan.

## **PEMBAHASAN**

### **Kerangka Dasar Politik Pemaknaan**

Politik pemaknaan merupakan bagian dari kajian filsafat politik. Filsafat politik merupakan studi tentang hakikat politik, makna dan peran politik dalam kehidupan masyarakat, dan dimensi-dimensi moral dalam berpolitik. Politik pemaknaan mengarahkan pada analisis fenomena-fenomena politik yang berkembang di masyarakat dan dunia politik yang saling berpengaruh satu dengan yang lainnya.

Politik pemaknaan memiliki ruang lingkup penggunaan bahasa yang digunakan oleh para elit politik dalam menerjemahkan tanda dan realitas sosial dan politik melalui sarana-sarana yang ada. Politik pemaknaan berupaya untuk mendeskripsikan bagaimana konstruksi realitas yang ada dan berkembang dipahami dan dimaknai. Makna-makna yang terkandung dalam suatu realitas sosial dan politik terkadang dimaknai secara berbeda karena ada pengaruh dan unsur-unsur politik yang bermain di dalamnya. Refleksi atas realitas

sosial dan politik yang terjadi di masyarakat di Indonesia pascareformasi menunjukkan dimensi moral yang muncul dalam fenomena sosial dan politik masyarakat Indonesia lebih mengarah pada proses dekonstruksi nilai-nilai moral dan makna tentang ideologi dan paham kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Kerangka pemahaman dalam melihat cara kerja politik dalam memaknai realitas sosial dan politik didasarkan pada suatu pemahaman dalam kerangka motif-motif politik seperti kekuasaan, kesenangan pribadi, kepentingan, dan kerjasama, serta keputusan-keputusan politik yang berkembang.

### **Pancasila Era Pascareformasi**

Pancasila Pascareformasi menarik untuk ditinjau dan dilihat kembali. Pancasila merupakan bagian dari jati diri dan identitas bangsa Indonesia. Membahas tentang Indonesia tidak dapat lepas dari Pancasila. Berbagai bentuk sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia apabila hendak dikaji lebih jauh selalu berkaitan dengan ideologi dan cita-cita bangsa-

nya. Pancasila memiliki peran penting dalam proses pembentukan negara bangsa. Keberadaan Pancasila di Indonesia tidak hanya sebatas ideologi dalam pengertian keyakinan politik tetapi Pancasila memiliki dimensi yang majemuk. Pancasila era Pascareformasi dapat dilihat dari aspek pemahaman dan pemaknaan yang berkembang di masyarakat. Pemahaman dan pemaknaan Pancasila muncul dan berkembang sesuai konteks zamannya. Dalam aspek sejarah, Pancasila diletakkan sebagai dasar negara Indonesia merdeka memiliki kedudukan yang jelas dan konkret dalam kehidupan kenegaraan. Pada era Pascareformasi, Pancasila dianggap kurang memiliki peran dan fungsinya, pemahaman dan pemaknaan tentang peran dan fungsi Pancasila yang kurang memiliki manfaat yang besar banyak disampaikan oleh para kelompok akademisi yang menolak keberadaan Pancasila dalam ruang publik dan akademik.

Pancasila dianggap hadir dalam ruang hampa karena minat terhadap Pancasila mulai melemah dengan adanya berbagai dinamika politik yang berkembang di Indonesia lebih

mengarah pada politik kekuasaan bukan politik kebangsaan. Pancasila Pascareformasi lebih banyak menjadi “alat permainan” politik yang dilakukan oleh para elit politik. Pancasila pernah ditafsirkan oleh MPR RI sebagai “pilar”. Tafsir sesat atas Pancasila ini banyak diikuti oleh kalangan akademisi yang tidak kritis dan mengikuti model pemahaman dan pemaknaan yang dilakukan oleh MPR RI melalui program 4 Pilarnya (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). Pancasila juga pernah dianggap hanya sekedar alat penguasa untuk “menggebug” para lawan politiknya. Pemahaman dan pemaknaan yang dikembangkan dalam versi ini lebih menekankan penafsiran Pancasila sebagai fungsi politik kekuasaan. Dalam perkembangan, Pancasila juga dimaknai oleh sebagian kelompok produk rezim orde baru yang telah usang dan tidak perlu diajarkan atau dipakai lagi. Pancasila Pascareformasi menunjukkan fenomena dan dinamika bahwa Pancasila hanya sekedar dianggap sebagai ideologi politik penguasa bukan menjadi dasarnya suatu negara dan pedoman berbangsa dan bernegara. Ragamnya penafsiran yang

dilakukan oleh elit politik dalam memaknai dan memahami Pancasila memunculkan dampak terkait dengan posisi dan peran Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu seperti apa.

Pemahaman Pancasila semakin kabur karena tidak ditemui rohnya. Pemahaman Pancasila yang kabur karena Pancasila dianggap berdiri sendiri dan tidak dikaitkan dengan landasan dan proses berdirinya negara. Negara diperlukan karena bertitik tolak dari watak dan hakikat manusia membutuhkan kehadiran negara (Rothbard, 2018:ix). Kehadiran negara sebagai bentuk membangun dan membina peradaban manusia. Kaburnya pemahaman tentang Pancasila karena roh dari Pancasila sebagai konstruksi berbangsa dan bernegara tidak ditemui dalam dialektika membangun negara di kalangan para penafsir dan pengkaji Pancasila yang berkembang saat ini. Problem dasar yang dapat ditangkap dari persoalan kaburnya pemahaman Pancasila karena mentalitas yang dibangun para elit bukan lagi pada upaya mengutamakan keselamatan bangsa dan negara tetapi lebih pada hasrat kekuasaan semata. Koentjara-

ningrat menggambarkan karakteristik mental Indonesia sangat kompleks. Ia membuat tiga kategori karakteristik mental Indonesia yang berkembang yaitu: 1). karakteristik mental orang lokal Indonesia (*indigenous*), karakteristik mental ini tumbuh dan berkembang sejak berabad-abad lamanya bersamaan dengan perkembangan etnik budaya bangsa Indonesia yang beragam, 2). Karakteristik mental orang Indonesia yang berkembang pada masa periode kolonial, karakteristik mental yang berkembang pada periode kolonial bersamaan dengan dominasi dan hegemoni politik kolonial terhadap masyarakat, 3). Karakteristik mental orang Indonesia yang berkembang paska perang dunia II, karakteristik mental ini belum menjadi bagian dari sistem nilai budaya yang ada di Indonesia dan belum sempat diinternalisasikan. Karakteristik mentalitas yang dibangun ini muncul dalam era perubahan. Norma-norma lama dihilangkan tetapi belum diganti dengan norma yang baru (Koentjaraningrat, 1988:107-108).

Anatomi pemahaman Pancasila Pascareformasi menunjukkan pola dekonstruksi atas tatanan nilai-nilai

yang sudah ada menjadi nilai-nilai yang dipahami sebatas pengetahuan dan pemahaman umum dari penafsir tentang Pancasila. Fachrudin dalam tulisannya berjudul "Polemik Tafsir Pancasila" menjelaskan Pancasila didalam dirinya mengandung potensi mengalami tarik ulur penafsiran yang tidak dapat dilepaskan dari konteks periode zamannya (Fachrudin, 2018: 19).

### **Analisis Politik Pemaknaan Terhadap Pancasila**

Fenomena politik Pascareformasi yang berkembang saat ini diikuti dengan dinamika politik menuju pemilihan umum presiden tahun 2019 menunjukkan periode penting dalam proses pemaknaan Pancasila dikaitkan dengan kehidupan beragama, kehidupan kebangsaan, dan kehidupan sosial dan politik. Gelombang demokratisasi yang masuk ke berbagai ranah kelembagaan, komunitas, dan individu membawa cara pandang masyarakat dalam memahami tentang negara menjadi titik tolak penting untuk membaca politik pemaknaan Pancasila. Fenomena politik sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2018 dapat diidentifikasi terkait dengan politik pemaknaan yang

terjadi di Indonesia. Tahap pertama, politik pemaknaan tentang Pancasila yang terjadi di Indonesia, semakin menguatnya ideologi ekstrimis dan fundamentalis mengancam eksistensi bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Saidi peneliti LIPI mengungkapkan bahwa:

"Radikalisme di kalangan pelajar dan mahasiswa itu terjadi pasca reformasi, dengan menyebar melalui Jamaah Tarbiyah (Ikhwanul Muslimin), termasuk HTI dan salafi yang merupakan bagian dari gerakan Islam transnasional."Sebagian besar perguruan tinggi umum, yang telah didominasi oleh Ichwanul Muslimin dan Islamis lainnya," jelas Anas. Disebutkan, jika pemahaman ini dibiarkan akan menyuburkan sikap intorelan dan bisa menyebabkan disintegrasi bangsa. Proses Islamisasi yang dilakukan di kalangan anak muda ini berlangsung secara tertutup, dan cenderung tidak terbuka pada pandangan Islam lainnya (<http://lipi.go.id/berita/single/Anak-anak-muda-Indonesia-makin-radikal/15089>, akses 7 Oktober 2018).

Narasi intoleransi, kekerasan, radikalisme, fundamentalisme, dan indoktrinasi ideologi berpaham radikal dan keagamaan semakin menguat sejak Pascareformasi. Berbagai kampus besar dan umum tidak lepas dari jeratan narasi dan hegemoni ideologi ekstrimis yang membawa pada konstruksi keberagaman, kebebasan, dan nilai-nilai kebangsaan menjadi surut. Pancasila dianggap tidak lagi penting



di kalangan generasi muda. Upaya dalam menjawab tantangan ideologis, presiden membuat lembaga disebut Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 dan kemudian pada tahun 2018 diperkuat menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pada pasal 3 Perpres Nomor 7 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

“BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya”.

Pada periode pemerintahan Jokowi, politik pemaknaan tentang Pancasila yang diletakkan oleh pemerintah berupaya untuk menegaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan filosofi bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai pedoman

dan garis filsafat politik pemerintahan Jokowi. Sedangkan, politik pemaknaan yang dilakukan oleh para elit politik terutama MPR RI memiliki bentuk yang berbeda dengan politik pemaknaan yang dirumuskan oleh Presiden. MPR RI lebih banyak menggunakan Pancasila sebagai model sosialisasi. Pancasila bukan menjadi dasar negara tetapi hanya dijadikan sebagai pilar negara. Model Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini menjadi model terburuk dalam menerjemahkan Pancasila secara kontekstual karena terjadi pembiasan makna dan hakikat bernegara melalui pemahaman sesat tentang bangunan bernegara. Pemahaman MPR RI ini membelokkan esensi dasar dari Pancasila sebagai dasar negara karena program Empat Pilar menyebut dan mengkategorikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar negara. pada periode sebelumnya juga menunjukkan model politik pemaknaan tentang Pancasila mulai dari B.J Habbie, Gusdur, Megawati Soekarnoputri, sampai Susilo Bambang Yudoyono merupakan periode yang mengambang dalam memaknai Pancasila bahkan pada akhir tahun 2009 terjadi

penyelewengan sejarah tentang kehidupan bernegara melalui program MPR RI bernama sosialisasi 4 Pilar yang sampai sekarang ini masih menyebut Pancasila sebagai pilar.

Analisis politik pemaknaan tentang Pancasila secara kelembagaan menunjukkan bahwa lembaga negara inkonsisten meletakkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendekatan politik pemaknaan yang dilakukan oleh lembaga negara dalam memahami dan memaknai Pancasila lebih pada pendekatan pragmatis. Politik pemaknaan yang dilakukan oleh komunitas dan individu lebih banyak membangun upaya merawat dan mempertahankan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Komunitas, masyarakat, dan individu memaknai Pancasila kembali pada pengertian dasar bahwa Pancasila merupakan nilai-nilai yang dikristalisasikan dari akar kebudayaan bangsa Indonesia. Pascareformasi berbagai gerakan menegakkan nilai-nilai Pancasila semakin menguat seperti munculnya organisasi kemasyarakatan Gerak Pancasila, Forum Kebangsaan, Gerakan Pengawal Pan-

casila (GPP), dan berbagai komunitas lainnya sampai pada inisiasi desa berkarakter Pancasila, dan kampung Pancasila.

## **KESIMPULAN**

Politik pemaknaan tentang Pancasila yang berkembang Pascareformasi menunjukkan suatu trend dan paradigma yang mengarah pada politik pemaknaan yang didasarkan pada pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara. Pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara semakin bias seiring dengan munculnya berbagai macam fenomena politik yang mengarah pada politik identitas atau identitas politik berbasis pada keagamaan, kepartaian, dan loyalitas terhadap tokoh tertentu. Politik pemaknaan tentang Pancasila muncul karena dinamika politik yang berkembang dalam konteks nasional yang mengarah pada disintegrasi bangsa dan upaya mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Benturan nilai-nilai Pancasila semakin menguat ketika dikait dengan proses politisasi agama menjadi gagasan ideologis untuk dijadikan bangunan kehidupan bernegara, ber-

bangsa, dan bermasyarakat oleh beberapa kelompok.

Politik pemaknaan terhadap Pancasila Pascareformasi berjalan secara inkonsisten karena memiliki pola sekedar menjawab tantangan ideologis yang mencoba mengubah dasar-dasar kehidupan bernegara Indonesia. Sumber utama inkonsistensi politik pemaknaan terhadap Pancasila karena desakan dan dorongan dari kelompok masyarakat yang berupaya mengganti nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara semakin menguat sehingga ada kelompok yang ingin mengganti dan ada kelompok yang ingin mempertahankan. Posisi yang berkembang terkait politik pemaknaan terhadap Pancasila ialah pertama, Pancasila dijadikan sebagai garis politik dan tujuan bernegara. Kedua, Pancasila dijadikan sebagai lawan dalam upaya untuk mencapai tujuan kekuasaan. Sehingga politik pemaknaan yang berkembang tentang Pancasila selalu dalam dua kubu yang berlawanan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Fachrudin, Anwar, Aziz. (2018). "Polemik Tafsir Pancasila", *dalam Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia, Edisi III/Januari 2018*. Yogyakarta: CRCS UGM. hal.1-26.

Koentjaraningrat. (1988). The Indonesian Mentality and Development Source: Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia, Vol. 3, No. 2 (AUGUST 1988), pp. 107-133 Published by: ISEAS - Yusof Ishak Institute Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/41057106>. Accessed: 20-09-2018 10:46.

Rothbard, Murray N. (2018). *Anatomi Negara. Judul Asli: Anatomy of the State, penerjemah R.A Husein*. Jawa Tengah: Parabel.

Saidi, Anas. (2016). "Anak-Anak Muda Indonesia Makin Radikal", sumber: <http://lipi.go.id/berita/single/Anak-anak-muda-Indonesia-makin-radikal/15089>, diakses 7 Oktber 2018, 12:21.

Suyitno,Amin., Gultom, R.M.S. (1981). *Memahami Pancasila dan P4*. Semarang: Satya Wacana.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden  
Pembinaan Ideologi Pancasila.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi  
Pancasila.

[https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU &menu=5](https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=5), diakses 7 Oktober  
2018, 17:47.

<http://lipi.go.id/berita/single/Anak-anak-muda-Indonesia-makin-radikal/15089>,  
diakses 7 Oktober 2018 12:17.